

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Maman S. dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta.
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, Visimedia, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, 1986, Intermasa, Jakarta.
- G.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- H. Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Kartini M. dan Gunawan W., 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 2015, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005, Intermasa, Jakarta.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 1982, Pradnya Paramita, Jakarta.

- R. Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shindarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

- Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, (Yogyakarta: Tesis Fakultas Hukum UGM, 2008).
- Eduardus Marius Bo, *Kedudukan PPAT dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Panel Diskusi Ikatan Advokat Indonesia Kota dan Cabang Malang bekerja sama dengan JTV Malang Raya dan UKCW Malang, 29 Maret 2008).
- Ghita Aprilia Tulenan, *Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang di Legalisasi Notaris*, (Lex Administratum, Volume II – Nomor 2, April-Juni 2014).
- Hamzah, *Tanggapan terhadap Makalah yang berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris sebagai Alat Bukti*, (Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV, 1989).
- Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, (Yogyakarta: Jurnal MKn FH UGM, 2017).

Maimunah N., Winanto W. Widodo S., *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya*, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN/TJK).

Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru). Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, TLNRI Nomor 4432.

Renny Listianita Suryaningsih, *Peran PPAT Dalam Proses Pembagian Hak Bersama Tanah Warisan di Surakarta*, (Jurnal Repertorium Edisi 3 Januari-Juni 2015).

Rizka Yustiardinia, *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perkawinan Dengan Perjanjian Pisah Harta*, (Medan: Tesis USU, 2017).

Yosandhi Raka Pradhipta, *"Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli"*, 2009, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 jam 13.20.

Yulia Dewitasari dan Putu Tuni C. L., *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, (Bali: FH Univ. Udayana).

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/12/69.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

E. Makalah, Artikel, Internet, dan Website

Balai Harta Peninggalan Kemenkumham, “Pengampuan”, diakses dari <https://bhbjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengampuan> pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, pukul 16:00.

Hukum Acara Perdata, “Perbedaan Prinsip Antara Permohonan dengan Gugatan”, diakses dari <https://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/> pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022, pukul 20:00.

Hukum Online, “Ada Beragam Definisi dan Modus Mafia Tanah”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-beragam-definisi-dan-modus-mafia-tanah--simak-penjelasan-lt61dd73256df5f?page=all> pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, pukul 19:00 WIB.

Misel and Partners, “Perjanjian Perkawinan di Indonesia”, diakses dari <http://miselandpartners.com/perjanjian-perkawinan-di-indonesia/> pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, pukul 23:00.

Rumah, “*Syarat dan Cara Urus Surat Keterangan Waris (SKW) 2022*”, diakses dari <https://www.rumah.com/panduan-properti/surat-keterangan-waris-52420> pada hari Kamis, pukul 00:14.

Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/37726/3/jiptummpp-gdl-dindasilvi-47785-3-babii.pdf> pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, pukul 18:00 WIB.